

LAMPIRAN I

FORM CAPAIAN KINERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DOMPU
 URUSAN : 1. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KELUARAN (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas :			
	KSP/USP	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{31}{31} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompus	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Ijin Usaha Simpan Pinjam}}{\text{Jumlah Koperasi yang Didukung}} \times 100\%$ <p>Koperasi yang mendapatkan Ijin Usaha Simpan Pinjam</p> <ol style="list-style-type: none"> KSP Jaya Perkasa Abadi KSU TambakMakmur KSP AekSibundong Jaya
	KSP/USP	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompus	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Ijin Usaha Simpan Pinjam}}{\text{Jumlah Koperasi yang Didukung}} \times 100\%$ <p>Koperasi yang mendapatkan Ijin Usaha Simpan Pinjam</p> <ol style="list-style-type: none"> KSP Jaya Perkasa Abadi KSU TambakMakmur KSP AekSibundong Jaya

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	KSP/USP	3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{70}{371} \times 100\%$ $= 0,18 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$
	KSP/USP	4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{7}{371} \times 100\%$ $= 0.018 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$
	KELEMBAGAAN KOPERASI	5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{60}{371} \times 100\%$ $= 0,16 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Daftar Hadir Peserta Diklat</p>
	KELEMBAGAAN KOPERASI	6.	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{60}{371} \times 100\%$ $= 0,16 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$ <p>Daftar Hadir Peserta Diklat</p>
	KELEMBAGAAN KOPERASI	7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk	$\frac{0}{371} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> $\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100\%$

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	371 = 0%		----- x 100% Jumlah Koperasi yang ada Tidak ada jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Daftar Hadir Peserta Diklat
	KELEMBAGAAN KOPERASI	8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	51 ----- x 100% 371 =0,137 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah Koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Tidak Ada Koperasi yang diterbitkan Sertifikan Nomor Induk Koperasi (NIK) Surat Pernyataan
	KELEMBAGAAN KOPERASI	9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	51 ----- x 100% 371 =0,137%	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Nama Koperasi yang di Fasilitasi Pembiayaan
	KSP/USP	10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	1 ----- x 100% 371 =0,002 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Surat Pernyataan
	KSP/USP	11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	7 ----- x 100% 371	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
			dalam daerah kabupaten / kota	= 0,018 %		----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Daftar Hadir Peserta Diklat
	KELEMBAGAAN KOPERASI	12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kilembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{181}{371} \times 100\%$ = 0,487 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Tidak ada dukungan untuk Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Surat Pernyataan
	KELEMBAGAAN KOPERASI	13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	$\frac{3}{371} \times 100\%$ = 0,008 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah Koperasi Yang ada Surat Pernyataan
	UKM	14.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS)	$\frac{0}{2584} \times 100\%$ = 0 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS) ----- x 100% Jumlah Usah Mikro Yang ada
	UKM	15.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{71}{2584} \times 100\%$ = 0,0274 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	RUMUS : Jumlah Usaha Mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah Usah Mikro Yang ada

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	UKM	16.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produkusaha	$\frac{75}{2509} \times 100\%$ $= 0,0298 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> <p><i>Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <i>Jumlah Usaha Mikro Yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk</i></p>
	UKM	17.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{63}{2521} \times 100\%$ $= 0,0249 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> <p><i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <i>Jumlah Usaha Mikro Yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i></p>
	UKM	18.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{104}{2584} \times 100\%$ $= 0,0402 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> <p><i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <i>Jumlah Usaha Mikro Yang ada</i></p>
	UKM	19.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan Melalui Lembaga pendampingan	$\frac{104}{2584} \times 100\%$ $= 0,0402 \%$	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompu	<p>RUMUS :</p> <p><i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ <i>Jumlah Usaha Mikro Yang ada</i></p>

LAMPIRAN II

FORM CAPAIAN KINERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN DOMPU
 URUSAN : 1. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM

INDIKATOR KINERJA HASIL (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		FORMULASI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM	1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{110}{371} \times 100\%$ =0,29 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompus	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
		2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{449}{2584} \times 100\%$ =0,173 %	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Dompus	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

LAMPIRAN III

FORM CAPAIAN KINERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : **DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DOMPUS**
URUSAN : **1. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM**

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kementerian / LPNK :	Peraturan Menteri / LPNK No : Tahun : Tentang :	Program : Kegiatan : Keluaran (Output) : Rincian Kegiatan :	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Dst			-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN:

Kolom (1) di isi Nomor urut

Kolom (2) di isi kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang memberikan penugasan (TP)

Kolom (3) di isi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintahan non kementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan

Kolom (4) di isi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis

Kolom (5) di isi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan

Kolom (6) di isi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan

Kolom (7) di isi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA

Kolom (8) di isi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah

Kolom (9) di isi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase

Kolom (10) di isi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan

Kolom (11) di isi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI KEGIATAN (%)	KET.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang :	Peraturan Gubernur : No : Tahun : Tentang :	Program : Kegiatan : Keluaran (Output) : RincianKegiatan :	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	dst			-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN :

- Kolom (1) di isi nomo rurut
- Kolom (2) di isi bidang urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan
- Kolom (3) di isi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) di isi nama program, kegiatan, output, dan rinciankegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) di isi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) di isi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/walikota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) di isi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) di isirealisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) di isirealisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) di isi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) di isirealisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

LAMPIRAN IV

FORM CAPAIAN KINERJA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI USAHA KECILDAN MENENGAH KABUPATEN DOMPU
URUSAN : 1. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UKM

NO.	KETERANGAN	CEK LIST	KETERANGAN
1.	Ringkasan DPA SKPD 2022 (Cover, hlm Program (Form 2.2), hlm TTD)	√	
2.	Ringkasan DPAPPKD 2022 (Cover, hlm isi Program (Form 2.2), hlm TTD)		Tidak Ada
3.	RKA SKPD 2022 (Cover, hlm. Program, hlm TTD)	√	
	RKA PPKD 2022 (Cover, hlm. Program, hlm TTD)		Tidak Ada
4.	Daftar Nama Jabatan Fungsional per 31 Desember 2022 per masing-masing urusan (Pada OPD) di TTD **Pejabat Berwenang	√	
5.	Laporan Keuangan 2022 (Neraca, LRA, dan CALK) SKPD		Tidak Ada
6.	Laporan Keuangan 2022 (Neraca, LRA, dan CALK) PPKD		Tidak Ada
7.	Fotocopy (FC) surat ketetapan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada urusan terkait, dan FC Cover		Tidak Ada
8.	Bukti penyebaran informasi publik melalui website resmi SKPD terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah		Tidak Ada
9.	SPM (SKPD Penyelenggara)		Tidak Ada

Dompu, Februari 2023
Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Dompu

HJ. DARYATI KUSTILAWATI, SE.M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670502 199203 2 010